

Dampak Kesenjangan Sosial dan Ekonomi terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kota Makassar

Alimin Alwi¹, Najamuddin², Nurul Mutmainnah³

^{1,2} Ilmu Sosiologi, Universitas Negeri Makassar

³ Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Negeri Makassar

e-mail: alimin.alwi@unm.ac.id¹, najamuddin@unm.ac.id²,
nurulmutmainnah.0701@gmail.com³

Abstrak

Kesenjangan sosial dan ekonomi merupakan kondisi ketidakseimbangan antar individu atau kelompok dalam lingkup kehidupan di lingkungan sosial. Kondisi pengangguran dan kemiskinan merupakan dua area yang terdampak oleh ketimpangan sosial dan ekonomi ini. Lebih jauh lagi, ketimpangan dalam prospek kesehatan dan pendidikan dapat menghalangi sebagian orang dan komunitas untuk memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang. Faktor lain yang menyebabkan kesenjangan tersebut semakin melebar adalah pembangunan infrastruktur yang tidak merata atau ketimpangan permukiman. Terakhir, ketika sekelompok orang merasa tersisih dan tidak memperoleh akses yang sama terhadap kesempatan ekonomi, ketidakpuasan sosial dan potensi konflik dapat meningkat. Untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak kesenjangan sosial dan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat di Makassar, penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif. Berdasarkan temuan penelitian, akses yang sama terhadap sumber daya, pendidikan, dan peningkatan infrastruktur di daerah tertinggal merupakan komponen penting dari upaya terpadu untuk mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi. Selain mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata, pendekatan ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, inisiatif untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi di berbagai tingkatan harus mengutamakan kebijakan yang menekankan penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan.

Kata kunci: *Kesenjangan Sosial, Ekonomi, Kesejahteraan Masyarakat*

Abstract

Conditions that are out of balance between people or groups in the context of social life are known as social and economic inequalities. Conditions of unemployment and poverty are two areas where this social and economic inequality has an impact. Furthermore, disparities in health and educational prospects can prevent some people and communities from having equal chances to grow. The gap can also be widened by uneven settlement disparities or infrastructural development, and the final one is Growing social discontent and the potential for conflict that could lead to When certain groups of people feel excluded and do not have equal access to economic possibilities, frustration and rage can result. In order to provide a more thorough knowledge of the effects of social and economic inequality on the welfare of the community in Makassar, this study employs a descriptive qualitative methodology. According to the study's findings, equal access to resources, education, and infrastructure upgrades in less developed areas are all necessary components of an integrated effort to address social and economic inequality. In addition to promoting equitable economic growth, this approach will raise societal well-being overall. Therefore, initiatives to lessen social and economic inequities at different levels should prioritize policies that emphasize job creation and empowerment.

Keywords: *Social Gap, Economic, Community Welfare*

PENDAHULUAN

Perluasan ekonomi telah lama menjadi tujuan pembangunan ekonomi di setiap negara di planet ini. Elemen terpenting dalam menentukan keberhasilan ekonomi jangka panjang suatu negara adalah pertumbuhan ekonomi. Perluasan ekonomi sangat dibutuhkan dan dianggap sebagai sarana untuk meningkatkan standar hidup penduduk yang terus bertambah. Ekonomi merupakan salah satu komponen vital yang menopang kehidupan, dan tidak mungkin untuk memisahkannya dari kehidupan manusia sehari-hari. Namun, karena sektor ekonomi ini sangat peka dan sering menimbulkan berbagai masalah, perselisihan, dan perpecahan, maka sektor ini memerlukan perhatian yang lebih besar dari semua orang (Islahiha et al., 2019).

Pertumbuhan penduduk merupakan masalah utama bagi negara-negara di seluruh dunia, terutama negara-negara berkembang seperti Indonesia, yang memiliki populasi terbesar keempat di dunia setelah AS, Tiongkok, dan India. Peningkatan populasi suatu negara dapat menimbulkan sejumlah masalah yang rumit, termasuk masalah sosial, budaya, pendidikan, ekonomi, dan kriminal. Ini juga berlaku di Sulawesi Selatan, yang dikenal sebagai salah satu daerah di Indonesia timur dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tercepat. Dengan tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi dari rata-rata negara tersebut, Oleh karena itu, Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mengalami laju pembangunan dan perluasan ekonomi tercepat. Berkat pertumbuhan ekonominya yang kuat, Sulawesi Selatan menjadi provinsi yang menarik kegiatan ekonomi dan menjadi pusat pembangunan dan kemajuan di Kawasan Timur Indonesia.

Tingginya laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan belum mampu memberikan peningkatan taraf hidup masyarakat secara signifikan. Hal ini tidak sejalan dengan capaian yang telah dicapai di sana, yang rata-rata pertumbuhannya lebih tinggi dari rata-rata nasional. Hal ini seharusnya dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan tingginya tingkat pembangunan manusia. Distribusi yang tidak merata, yang menguntungkan sebagian masyarakat dan merugikan sebagian yang lain, tidak dapat dipungkiri merupakan akar dari segala kesenjangan yang terjadi saat ini, baik kesenjangan sosial ekonomi, pendidikan, maupun kesenjangan lainnya. Selain itu, sistem ekonomi kapitalis yang selama ini kita anut telah memberikan kontribusi besar terhadap kehancuran ekonomi, terutama masalah kesenjangan sosial ekonomi. Sistem ekonomi tradisional memungkinkan hak kepemilikan pribadi atas segala sesuatu, yang dapat menyebabkan terganggunya arus distribusi. Sebab, mereka yang diuntungkan oleh kebebasan ini akan semakin banyak yang memimpin, sehingga menciptakan kesenjangan yang semakin lebar yang akan membuat yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, jumlah penduduk miskin di Kota Makassar bervariasi. Pada tahun 2021, 2022, dan 2023, jumlah penduduk miskin di Kota Makassar adalah 74.690 jiwa (4,82%), 71.830 jiwa (4,58%), dan 80.320 jiwa (5,07%). Fenomena ini menjadi penyebab meningkatnya angka kemiskinan. Danny Pomanto, mantan Wali Kota Makassar, mengatakan urbanisasi turut menyumbang angka kemiskinan di Kota Makassar. Pada tahun 2021 hingga 2023, jumlah penduduk Kota Makassar bertambah dari 1.424.440 jiwa menjadi 1.454.960 jiwa. Fenomena ini menjadi penyebab meningkatnya angka kemiskinan.

Ketimpangan dalam berbagai aspek kehidupan sosial disebut sebagai ketimpangan sosial. Adanya kesenjangan antara kelas atas dan kelas bawah juga dapat dijadikan analogi untuk keadaan ini (Aisyah, 2023). Masalah sosial yang mendasar adalah perbedaan yang mencolok antara cita-cita dan keadaan sebenarnya, atau perbedaan antara apa yang kita yakini seharusnya dan apa yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan sosial (Handayani & Watiyah, 2023).

Tidak diragukan lagi, penyebab mendasar dari semua kesenjangan kontemporer, baik itu kesenjangan sosial, pendidikan, atau lainnya, adalah distribusi yang tidak merata, yang membantu beberapa anggota masyarakat sementara merugikan yang lain. (Harahap & Syafii, 2024). Jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan, kesenjangan ekonomi atau ketidaksetaraan dalam distribusi pendapatan antara kelompok berpendapatan tinggi dan rendah, kurangnya pendidikan, kecenderungan harga naik secara stabil dan umum, dan meningkatnya pengangguran merupakan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kemiskinan.

Penelitian tentang kesenjangan sosial dan ekonomi telah dilakukan beberapa riset beberapa tahun terakhir. Menurut penelitian, (Navaro, 2020) dengan judul "pengaruh kesenjangan

sosial terhadap perubahan pola pikir masyarakat mengenai paham terorisme di Indonesia” menguraikan secara rinci bagaimana kesenjangan sosial mempengaruhi masyarakat, khususnya kelas menengah ke bawah, dan bagaimana hal itu menyebabkan mereka mengadopsi perspektif yang berbeda terhadap ideologi radikal—dalam hal ini, terorisme. Setiap orang harus bertanggung jawab untuk mencegah atau mengelola dampak kesenjangan sosial ekonomi guna menghadapi perubahan persepsi publik terhadap terorisme, khususnya di Indonesia, negara berkembang atau semi-maju. Hal ini sejalan dengan penelitian (Hasibuan, 2023) dengan judul “Pengaruh Kesenjangan Sosial terhadap Stabilitas Ekonomi” yang menyatakan Stabilitas ekonomi sangat dipengaruhi oleh kesenjangan sosial. Ketidakpuasan yang disebabkan oleh kesenjangan yang besar dalam masyarakat dapat mengakibatkan ketidakstabilan sosial dan politik. Kepercayaan investor kemudian dapat menurun sebagai akibatnya, yang dapat berdampak pada investasi dan ekspansi ekonomi. Tingkat kesenjangan yang tinggi juga dapat menurunkan daya beli masyarakat dan meningkatkan angka pengangguran, yang keduanya akan menghambat kemajuan ekonomi. Studi ini menunjukkan bahwa upaya yang lebih terkonsentrasi untuk mengurangi kesenjangan sosial diperlukan untuk membangun stabilitas ekonomi yang langgeng. Didukung oleh penelitian (Agus Yusuf Ahmadi, 2022) yang menjelaskan mengapa istilah “kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin” juga digunakan untuk menggambarkan kesenjangan ekonomi. Konsumsi, pendapatan, dan kekayaan adalah tiga indikator kesenjangan ekonomi. Kesetaraan ekonomi, kesetaraan pengeluaran, dan kesetaraan kesempatan adalah semua aspek dari masalah kesenjangan ekonomi.

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori ketimpangan, Gagasan tentang ketimpangan diterapkan dalam penelitian ini. Ketimpangan dalam keberhasilan ekonomi antara si kaya dan si miskin, yang tercermin dalam kesenjangan pendapatan, dapat dipahami sebagai ketimpangan distribusi pendapatan. Di negara-negara berkembang, pengaruh umpan balik yang signifikan dan pengaruh penyebaran yang terbatas menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Ada dua model ketimpangan: teori Neo-klasik dan teori yang diciptakan oleh Harrod Domar.

Dari informasi latar belakang yang diberikan, semakin jelas terlihat bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Bahwa terdapat kesenjangan yang mencolok dalam masyarakat akibat ketimpangan sosial ekonomi. Ketimpangan ekonomi, atau distribusi pendapatan yang tidak merata antara kelompok berpendapatan tinggi dan rendah, kemiskinan, atau jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, dan kurangnya keselarasan antara ukuran dan nilai sosial dengan realitas dan tindakan sosial merupakan penyebab utama kesenjangan sosial. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memastikan bagaimana ketimpangan sosial dan ekonomi mempengaruhi kesejahteraan umum masyarakat di Makassar.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Memahami masalah masyarakat melalui situasi nyata atau latar alamiah yang komprehensif, rumit, dan mendalam merupakan fokus penelitian kualitatif. (Abdul Fattah Nasution, 2019). Jenis penelitian ini adalah deskriptif, di mana metode deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya. (Sugiono, 2013). Wawancara mendalam, observasi partisipan, dan analisis dokumen merupakan beberapa metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Sementara observasi partisipan memungkinkan peneliti untuk memeriksa konteks secara langsung, wawancara mendalam memungkinkan mereka untuk memperoleh pemahaman dan wawasan yang mendalam dari para informan. Analisis dokumen membantu dalam memahami konteks dan sejarah materi yang saat ini tersedia. Warga Makassar menjadi informan penelitian. Untuk memeriksa literatur dan jurnal ilmiah yang relevan dengan penyelidikan ini, tinjauan literatur juga dilakukan. Teknik untuk reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan digunakan dalam proses analisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Kesenjangan Sosial dan Ekonomi terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Meningkatnya Kemiskinan dan Pengangguran.

Kota Makassar sebagai pusat ekonomi di Indonesia Timur mengalami pertumbuhan yang pesat, tetapi kesenjangan sosial dan ekonomi masih menjadi tantangan besar. Salah satu dampak utamanya adalah meningkatnya kemiskinan dan pengangguran, yang berdampak langsung pada kesejahteraan Masyarakat. Seseorang yang dianggap berada dalam angkatan kerja dan secara aktif mencari pekerjaan pada tingkat upah tertentu tetapi belum menemukan posisi yang diinginkannya dikatakan menganggur. (J. W. Ningrum et al., 2020). Pembatasan kemampuan orang untuk bekerja dapat menyebabkan peningkatan pengangguran. Seseorang yang tidak terlibat dalam kegiatan yang menghasilkan pendapatan dianggap menganggur. Orang yang mencari pekerjaan atau Pengangguran juga bisa merupakan mereka yang bekerja tetapi usahanya tidak efektif.; pengangguran tidak hanya terbatas pada mereka yang tidak pernah bekerja (Syariah, 2020).

Kurangnya sumber daya dan uang untuk Memenuhi kebutuhan seperti perumahan, makanan, pakaian, dan tingkat kesehatan serta pendidikan yang layak merupakan beberapa alasan yang berkontribusi terhadap kemiskinan. Kemiskinan juga terkait dengan kurangnya prospek pekerjaan, dan orang-orang yang termasuk dalam kategori ini biasanya tidak memiliki pekerjaan (menganggur), kesehatan yang buruk, dan tingkat pendidikan yang rendah. Menyelesaikan masalah pengangguran, pendidikan, kesehatan, dan masalah lain yang terkait langsung dengan masalah kemiskinan tidak dapat diselesaikan secara terpisah. Dengan kata lain, strategi tersebut perlu dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi di berbagai sektor dan pelaku. (Susanti, 2013). Berdasarkan wawancara dengan responden, yang mengatakan bahwa:

"Kesenjangan sosial dan ekonomi sangat dipengaruhi oleh meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran karena kesenjangan antara kelompok ekonomi atas dan bawah akan semakin terlihat karena semakin banyak orang tidak memiliki sumber pendapatan yang stabil. Kaum miskin merasa semakin sulit untuk melepaskan diri dari lingkaran kemiskinan sebagai akibat dari kesenjangan ini, yang juga menciptakan kesenjangan dalam akses terhadap peluang ekonomi, kesehatan, dan Pendidikan. saya juga percaya bahwa tingkat pengangguran yang tinggi dapat menyebabkan sejumlah masalah sosial, termasuk meningkatnya angka kejahatan, ketidakstabilan sosial, dan daya beli yang buruk, yang semuanya pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan".

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, kesenjangan sosial yang semakin besar dapat menimbulkan rasa ketidakadilan dan kecemburuan sosial, yang dapat berujung pada konflik dan meningkatnya tindak kejahatan. Kondisi ini berdampak pada stabilitas sosial dan ekonomi Kota Makassar secara keseluruhan, selain juga pada masyarakat yang terdampak secara langsung. Oleh karena itu, untuk mengembangkan kebijakan yang lebih inklusif, diperlukan upaya nyata dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor publik dan bisnis, serta masyarakat luas. Untuk mewujudkan kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh warga Kota Makassar, berbagai tindakan seperti perluasan akses pendidikan dan pelatihan kerja, perluasan kesempatan kerja, dan pemberdayaan kelompok rentan secara ekonomi dapat membantu menutup kesenjangan sosial dan ekonomi. Hal ini sejalan dengan penelitian (Ishak et al., 2020) yang menyatakan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap angka kemiskinan, dengan kata lain terdapat hubungan searah antara kemiskinan dengan pertumbuhan ekonomi yang merupakan hasil dari aktivitas perekonomian Kota Makassar. Meskipun terjadi pertumbuhan ekonomi, namun pertumbuhan tersebut belum merata karena strategi yang digunakan masih lebih mengutamakan percepatan pertumbuhan ekonomi daripada pemerataan dan masih dikuasai oleh kelompok masyarakat kaya sehingga menimbulkan ketimpangan dan kesenjangan pendapatan dalam masyarakat. Oleh karena itu, tingkat kemiskinan dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh variabel pengangguran yang diukur dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Oleh karena itu, jumlah penduduk miskin akan meningkat seiring dengan peningkatan variabel pengangguran, dan sebaliknya. Jika pasar tenaga kerja dapat menyerap tenaga kerja saat ini, terutama di industri padat karya, dan mendistribusikannya ke semua kelompok pendapatan, termasuk masyarakat miskin, maka upaya untuk menurunkan

tingkat kemiskinan akan berhasil. Penelitian juga mendukung hal ini (Sinaga et al., 2023) yang menyatakan Temuan analisis menunjukkan bahwa kemiskinan di Kepulauan Nias dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh pengangguran. Ini berarti bahwa meningkatnya angka pengangguran akan berkontribusi terhadap meningkatnya kemiskinan di Kepulauan Nias.

Akses Terbatas terhadap Pendidikan dan Kesehatan

Ketimpangan dalam kehidupan bermasyarakat dapat disebut sebagai kesenjangan sosial. Hal ini memiliki dampak yang sangat mengkhawatirkan terhadap keadaan masyarakat karena berdampak signifikan terhadap ketimpangan yang menyebabkan kemiskinan, serta terbatasnya akses terhadap perawatan kesehatan dan pendidikan. (Araafi et al., 2024). Ketimpangan sosial juga dikenal ketika terjadi di berbagai bidang masyarakat. Perbedaan antara kelas atas dan kelas bawah juga dapat dibandingkan dengan ini. Orang-orang dari kelas sosial ekonomi bawah sering kali kesulitan untuk mendapatkan akses ke layanan kesehatan dan pendidikan berkualitas tinggi. Ketimpangan ini diperparah oleh biaya sekolah yang mahal dan layanan kesehatan yang tidak memadai, yang memperparah lingkaran kemiskinan yang sulit diatasi. (Fabela & Khairunnisa, 2024). Berdasarkan wawancara dengan responden, yang mengatakan bahwa:

"Mereka yang memiliki akses terbatas ke sekolah, khususnya mereka yang berasal dari latar belakang berpendapatan rendah, akan merasa kesulitan untuk memperoleh keterampilan dan informasi yang dibutuhkan untuk mendapatkan posisi terhormat. Akibatnya, mereka terus hidup dalam kemiskinan, yang akhirnya memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi. Selain itu, kesejahteraan masyarakat bisa memburuk karena akses yang tidak memadai ke layanan kesehatan berkualitas tinggi. Orang miskin yang tidak memiliki akses ke layanan kesehatan berkualitas biasanya memiliki kesehatan yang buruk, yang dapat mengganggu kemampuan mereka untuk bekerja dan menurunkan prospek mereka untuk meningkatkan standar hidup. Kurangnya akses ke layanan kesehatan dan pendidikan tidak hanya memengaruhi orang tetapi juga perluasan ekonomi secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, kesenjangan sosial dan ekonomi di Kota Makassar semakin melebar dan kesejahteraan masyarakat terhambat akibat akses yang kurang memadai terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih dari pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk menjamin bahwa setiap orang dalam masyarakat memiliki akses yang sama terhadap layanan kesehatan dan pendidikan yang bermutu. Hal ini sejalan dengan penelitian (Atmayanti & Malthuf, 2023), diklaim bahwa faktor-faktor berikut berkontribusi terhadap perbedaan sosial dan ekonomi dalam masyarakat: pendidikan publik; status sosial; keterbatasan pola pikir masyarakat konvensional; kepemilikan aset dan uang masyarakat; dan kurangnya fasilitas publik yang memadai. Hal ini didukung juga oleh penelitian (Putra & Robertus, 2022), dinyatakan bahwa variabel ketimpangan pendapatan, kesehatan, dan tingkat pendidikan semuanya berdampak terhadap variabel tingkat kemiskinan di kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat, baik secara sendiri-sendiri maupun secara gabungan.

Meningkatnya Ketimpangan Permukiman

Di kota Makassar, terdapat perbedaan mencolok antara kawasan elit dan permukiman kumuh. Wilayah dengan infrastruktur yang baik hanya dapat dinikmati oleh kelompok ekonomi atas, sementara masyarakat miskin tinggal di lingkungan dengan sanitasi buruk dan risiko tinggi terhadap bencana lingkungan. Keberadaan beberapa permukiman kumuh di sekitar permukiman kelas atas menjadi bukti salah satu ketimpangan tersebut. Ruang terbuka hijau di wilayah desa masih sangat sedikit; di beberapa komunitas, tidak ada taman atau lapangan sama sekali. Akibatnya, alasan di balik jarak antara kota satelit dan wilayah sekitarnya harus dipahami. Lebih jauh, terdapat ketimpangan pendapatan yang mencolok antara penduduk lokal dan penghuni perumahan, yang berkontribusi pada kesenjangan ekonomi. Seiring dengan kemajuan pembangunan perumahan, kesenjangan kesejahteraan antara kelompok berpendapatan tinggi dan rendah semakin melebar, sebagaimana ditunjukkan oleh ketimpangan pendapatan. Rasa ketimpangan yang terus berlanjut juga dipengaruhi oleh peningkatan ketimpangan pendapatan yang tidak proporsional setelah tersedianya perumahan. (Novita 2023). Berdasarkan wawancara dengan responden, yang mengatakan bahwa:

“Kesenjangan perumahan dapat menyebabkan kesenjangan sosial, di mana orang kaya tinggal di lingkungan yang lebih makmur dengan fasilitas lengkap dan orang miskin dikucilkan di lingkungan dengan kondisi yang kurang mendukung pertumbuhan ekonomi mereka. Akibatnya, kesenjangan antara kelas ekonomi atas dan bawah semakin lebar dan mobilitas sosial pun terbatas. Pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan juga dipengaruhi oleh kesenjangan perumahan. Mayoritas individu kurang berkontribusi terhadap kemajuan ekonomi ketika mereka tinggal di lingkungan yang tidak mendukung kesejahteraan dan produktivitas mereka”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, kesenjangan permukiman menambah kesenjangan ekonomi yang semakin besar selain berdampak pada dimensi sosial. Akibatnya, berbagai pemangku kepentingan harus bekerja sama untuk mendistribusikan pembangunan dengan lebih baik, meningkatkan infrastruktur di daerah permukiman yang kurang diminati, dan mengembangkan undang-undang yang mendorong inklusi sosial dan ekonomi di semua tingkat masyarakat di Kota Makassar. Hal ini sejalan dengan penelitian (Br Tumeang et al., 2023), dinyatakan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi sangat dipengaruhi oleh ketimpangan permukiman, yang pada gilirannya berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Misalnya, sebuah studi yang dilakukan di Kelurahan Glugur II Kota Medan menemukan korelasi kuat antara kemiskinan dan permukiman kumuh, yang mencerminkan kesenjangan sosial yang sebenarnya di lingkungan perkotaan.

Meningkatnya ketidakpuasan sosial dan kemungkinan konflik

Konsekuensi lain dari ketimpangan sosial dan ekonomi termasuk meningkatnya ketidakpuasan sosial dan kemungkinan konflik. Ketika sekelompok individu merasa dikucilkan dan tidak memiliki akses yang sama terhadap berbagai kemungkinan ekonomi, rasa frustrasi dan kemarahan dapat muncul. Ketidakstabilan politik, protes sosial, dan peningkatan kejahatan adalah beberapa contohnya. Akan sulit untuk membangun suasana yang damai dan stabil jika kesejahteraan ekonomi dan masyarakat tidak seimbang. Oleh karena itu, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya harus mengembangkan kebijakan yang inklusif untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan semua lapisan masyarakat (E. P. Ningrum et al., 2024).

Galtung menggunakan segitiga konflik untuk menggambarkan analisis konflik. Ia menunjukkan bagaimana setiap orang, kelompok, dan organisasi memiliki serangkaian kepentingannya sendiri. Kepentingan ini dapat terwujud sebagai kepentingan politik atau ekonomi. Dalam konteks yang sama, dua kelompok sosial dengan kepentingan ekonomi masing-masing akan membentuk persepsi terhadap kelompok di luarnya. Perilaku tertentu yang menimbulkan konflik dan situasi tegang akan muncul akibat proses ini. Hubungan atau pertukaran sebab-akibat yang menimbulkan konflik sosial dikaji dalam segitiga konflik ini. Sikap, tindakan, dan kontradiksi membentuk ketiga segitiga tersebut. Pandangan anggota etnis terhadap topik tertentu yang berkaitan dengan kelompok lain dikenal sebagai sikap. Kerja sama, persaingan, atau konflik adalah contoh perilaku. Penciptaan keadaan yang melibatkan masalah dengan sikap dan perilaku sebagai suatu proses dikenal sebagai kontradiksi (Zuldin, 2019). Berdasarkan wawancara dengan responden, yang mengatakan bahwa:

“Meningkatnya ketidakpuasan masyarakat dan kemungkinan terjadinya konflik dapat menyebabkan ketidakstabilan yang menghambat kemajuan sosial dan ekonomi. Kebijakan dan distribusi sumber daya yang tidak merata dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, memicu demonstrasi dan kesenjangan sosial. Konflik-konflik ini bisa memperburuk kesenjangan sosial, mengganggu aktivitas ekonomi, dan merusak infrastruktur. Selain itu, ketidakstabilan menghalangi investor, menghambat ekspansi ekonomi, dan mengurangi lapangan pekerjaan. Seiring berjalannya waktu, keadaan ini secara signifikan mengganggu kesejahteraan masyarakat dengan mempersulit mereka memperoleh peluang ekonomi, perawatan kesehatan, dan Pendidikan “.

Menurut hasil wawancara, meningkatnya ketidakpuasan dan kemungkinan terjadinya konflik dapat memengaruhi ketimpangan sosial dan ekonomi dalam kesejahteraan masyarakat karena hal tersebut menyebabkan ketidakstabilan yang menghambat banyak aspek kehidupan sehari-hari. Masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah akibat ketidakpuasan yang

disebabkan oleh kebijakan yang tidak adil dan alokasi sumber daya yang tidak merata, yang pada gilirannya memicu protes dan keresahan sosial. Hal ini sejalan dengan penelitian (Nisyak et al., 2023) yang menyatakan bahwa ketimpangan sosial dapat disebabkan oleh pembangunan infrastruktur perkotaan yang tidak merata. Masyarakat adat di desa-desa mengalami dampak negatif seperti beralih ke gaya hidup yang lebih konsumtif, kurangnya kesempatan kerja, dan perbedaan status sosial, yang dapat menyebabkan ketidakpuasan sosial yang dapat menimbulkan konflik dan menghambat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Diperkuat oleh penelitian (Loso judijanto, 2020) yang mengklaim bahwa selain menyebabkan ketidakadilan sosial, ketimpangan kekayaan berdampak buruk pada kohesivitas sosial dan stabilitas politik. Secara ekonomi, konsentrasi kekayaan di tangan sejumlah kecil orang atau organisasi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang dengan mengurangi tingkat investasi dan memperluas kesenjangan peluang ekonomi. Mencapai kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan memerlukan penanganan kesenjangan kekayaan melalui langkah-langkah seperti reformasi pajak progresif, perluasan kesempatan pendidikan, dan program jaring pengaman sosial.

Cara Mengatasi Kesenjangan Sosial Dan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Menurut (E. P. Ningrum et al., 2024) ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah kesenjangan sosial dan ekonomi di Masyarakat yaitu :

1. Memberikan bantuan pendidikan, seperti beasiswa yang dapat meringankan beban keuangan bagi siswa luar biasa dari keluarga berpenghasilan rendah, dan melatih guru untuk meningkatkan metode dan kemampuan mengajar mereka dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan dan membuat proses belajar mengajar lebih efisien.
2. Di banyak daerah miskin, pembangunan infrastruktur—termasuk membangun jalan, menyediakan listrik, memasang air bersih, dan membangun jembatan—sangat penting untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas, yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Pendekatan strategis untuk mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) meliputi kemudahan akses keuangan, penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan untuk meningkatkan kemampuan manajerial, dan pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas jangkauan pasar dan efisiensi operasional.
4. Untuk memberikan jaminan sosial dan memenuhi kebutuhan dasar mereka, serta mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, sangat penting untuk memperluas program jaminan sosial dan memberikan bantuan langsung tunai kepada kelompok masyarakat yang kurang mampu dan mereka yang tinggal di daerah pedesaan.
5. Untuk memberikan kesempatan yang lebih baik bagi masyarakat dalam mendapatkan pekerjaan yang layak dan memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian, kesempatan kerja yang setara dapat dicapai dengan meningkatkan investasi pada industri yang menjanjikan seperti sektor kreatif dan pertanian serta dengan menawarkan program pelatihan dan keterampilan kerja yang sesuai dengan permintaan pasar.

(Lestari & Ainulyaqin, 2022) mencatat bahwa untuk memperbaiki paradigma pembangunan ekonomi, sangat penting dan menjadi prioritas. Dalam meminimalkan kesenjangan antara si kaya dan si miskin, serta antara sektor-sektor produktif dan antar wilayah dalam hal ketersediaan infrastruktur yang memadai, dan sebagainya. Jika program industrialisasi terlaksana dan semua anggota masyarakat diberikan hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam pelaksanaannya, maka akan berdampak signifikan terhadap kemajuan ekonomi suatu bangsa. Hal ini akan menciptakan prospek baru bagi pertumbuhan ekonomi di sektor industri dengan memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang dalam masyarakat. Selain itu, dengan adanya peluang ini, masyarakat akan merasakan adanya peningkatan upah dan pendapatan serta berbagai kegiatan ekonomi (spesialisasi). Ekonomi Islam sangat menekankan pada keterkaitan antara pelaku ekonomi dalam suatu industri dan pengelolaan sumber daya ekonomi untuk mencapai tujuan yang diinginkan berdasarkan prinsip saling menguntungkan (*win-win solution*). Karena pengaruhnya yang signifikan terhadap

pertumbuhan ekonomi suatu negara, pengembangan sektor industri saat ini menjadi prioritas utama untuk dikembangkan. Dalam Islam, kerangka maqashid syariah harus diikuti ketika mengawasi sektor industri. Hasilnya, manfaat dan pertumbuhannya menghasilkan nilai ekonomi yang signifikan bagi kemajuan negara dan menguntungkan karena kepatuhannya pada syariah.

SIMPULAN

Banyak masyarakat berjuang melawan kesenjangan sosial dan ekonomi, yang dapat memengaruhi kesejahteraan masyarakat dengan berkontribusi pada berbagai masalah seperti pengangguran dan kemiskinan. Lebih jauh lagi, kesenjangan dalam akses ke layanan kesehatan dan pendidikan dapat mencegah sebagian orang dan masyarakat memperoleh kesempatan pembangunan yang adil. Kesenjangan tersebut juga dapat diperlebar oleh pembangunan infrastruktur yang tidak merata atau kesenjangan permukiman. Terakhir, ketika sekelompok orang merasa dikucilkan dan tidak memiliki akses yang sama terhadap peluang ekonomi, ketidakpuasan sosial dan potensi konflik dapat meningkat, yang dapat menyebabkan frustrasi dan kemarahan.

Agar semua lapisan masyarakat dapat menikmati pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup, pemerintah dan pemangku kepentingan harus mengadopsi kebijakan yang komprehensif dan terpadu untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dan menghasilkan kesejahteraan yang lebih merata, kerja sama antara berbagai pihak pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil sangat penting. Merupakan tugas semua pemangku kepentingan untuk menumbuhkan suasana yang mendorong pembangunan yang inklusif. Program dapat ditingkatkan untuk melayani kelompok yang paling rentan dengan lebih baik. Lebih jauh lagi, akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan akan menjamin bahwa upaya difokuskan dan memberikan dampak yang besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Yusuf Ahmadi, S. (2022). *Zakat solusi kesenjangan ekonomi di indonesia*. 20(1), 105–123. <https://doi.org/10.53625/joel.v1i7.1482>
- Aisyah, N. N. (2023). Analisis Penyebab Serta Dampak Kesenjangan Sosial-Ekonomi Pasca Pandemi Beserta Solusi Untuk Mengatasinya. *Proceedings Series of Educational Studies National Conference from Magister of Education Management*, 231–234.
- Araafi, F. Al, Sadam, M., Tsabitah, K. N., & Anindya, R. R. (2024). Kesenjangan Sosial-Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19: Analisis Kritis Terhadap Penyebab dan Dampaknya pada Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 17(1), 819–829. <https://doi.org/10.46306/jbbe.v17i1.470>
- Atmayanti, T., & Malthuf, M. (2023). Kesenjangan Sosial dan Ekonomi Masyarakat Daerah Terpencil: Studi Kasus Desa Pulau Maringik. *JPEK (Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan)*, 7(1), 104–114. <https://doi.org/10.29408/jpek.v7i1.9155>
- Br Tumeang, I. M., Nasution, A. F., Marpaung, N. Z., & Malik, R. (2023). Permukiman kumuh sebagai bentuk kesenjangan di perkotaan (Studi kasus Kelurahan Glugur Darat II Kota Medan). *Jurnal Sosiologi*, VI(2), 51–65. <https://doi.org/10.59700/js.v14i2.9580>
- Fabela, Z., & Khairunnisa, A. (2024). Dampak Kesenjangan Sosial Di Indonesia. *senri: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(6), 3158–3164. <https://doi.org/10.55681/senri.v3i6.3004>
- Handayani, N., & Watiyah, W. (2023). Peran Guru Bk Dalam Mengurangi Kesenjangan Sosial Ekonomi Siswa Sma Al-Ikhlash. *Muhafadzah*, 2(1), 30–37. <https://doi.org/10.53888/muhafadzah.v2i1.575>
- Hasibuan, R. M. A. (2023). *Pengaruh Kesenjangan Sosial terhadap Stabilitas Ekonomi*. 1–13.
- Ishak, R. A., Zakaria, J., & Arifin, M. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Makassar. *PARADOKS: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(2), 41–53. <https://doi.org/10.33096/paradoks.v3i2.463>
- Islahiha, N. A., Frita, N., & Maulana, R. (2019). Penerapan Sistem Perekonomian Syariah Dalam Mengatasi Kesenjangan Sosial Ekonomi Di Indonesia. *Pkm-P*, 3(2). <https://doi.org/10.32832/pkm-p.v3i2.472>
- Lestari, D. S. T., & Ainulyaqin, M. H. (2022). Program Industrialisasi Dalam Mengatasi

- Kesenjangan Ekonomi Di Masyarakat: Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 288. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4077>
- Loso judijanto, A. (2020). Ketidakmerataan kekayaan: kajian literatur tentang implikasi sosial dan ekonomi. *Journal geej*, 7(2), 61–69.
- Maulana, I. R. (2023). Kesenjangan Sosial dalam Distribusi Kekayaan: Tantangan Bagi Pembangunan Berkelanjutan. *Literacy Notes*, 1(2), 1–12.
- Navaro, J. A. (2020). Pengaruh Kesenjangan Sosial Terhadap Perubahan Pola Pikir Masyarakat Mengenai Paham Terorisme Di Indonesia. *Universitas Brawijaya*, November.
- Ningrum, E. P., Nursyamsi, S. E., Siregar, N., Bhayangkara, U., & Raya, J. (2024). *Faktor Terkait Kesenjangan Ekonomi dan Kesejahteraan*. 7(September), 116–126. <https://doi.org/10.36815/prive.v7i2.3480>
- Ningrum, J. W., Khairunnisa, A. H., & Huda, N. (2020). Pengaruh Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia Tahun 2014-2018 dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 212. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1034>
- Nisyak, I. Q., Handoyo, P., & Harianto, S. (2023). Kesenjangan Sosial Masyarakat Urban di Balik Pembangunan Infrastruktur Kota (Studi di Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya). *Sosio E-Kons*, 15(2), 206. <https://doi.org/10.30998/sosioekons.v15i2.17769>
- Novita Maulida Ikmal, Miskan, N. N. (2023). *Analisis Fenomena Kesenjangan Ekonomi Kota Satelit Citraland Surabaya Dengan Kawasan sekitarnya*. 1(10), 10–20.
- Putra, E. P., & Robertus, M. H. (2022). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Kesehatan, Dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten:Kota Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. *Diponegoro Journal of Economics*, 11(2), 115–125.
- Sinaga, M., Winda Hardiyanti Damanik, S., Suriyanto Zalukhu, R., Piter Sony Hutauruk, R., & Collyn, D. (2023). Pengaruh Pendidikan, Pendapatan Per Kapita Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kepulauan Nias. *Jurnal Ekuilnomi*, 5(1), 140–152. <https://doi.org/10.36985/a4tg4s88>
- Sugiono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Issue January).
- Susanti, S. (2013). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di Jawa Barat dengan Menggunakan Analisis Data Panel. *Jurnal Matematika Integratif*, 9(1), 1. <https://doi.org/10.24198/jmi.v9i1.9374>
- Syariah, J. E. (2020). *Meningkatnya angka pengangguran ditengah pandemi (covid-19) Fahri ; Abd . Jalil ; Sri Kasnelly Email : fahrismith7@gmail.com Program Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal ABSRACT*. 2(Desember 2019), 45–60.
- Zuldin, M. (2019). Ketimpangan Sebagai Penyebab Konflik: Kajian Atas Teori Sosial Kontemporer. *temali : Jurnal Pembangunan Sosial*, 2(1), 157–183. <https://doi.org/10.15575/jt.v2i1.4050>